

Buletin Parlementaria

Nomor 1105/IV/V/2020 • Mei 2020



DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang



9 772614 339005



8 Pemberian Asimilasi
Narapidana Harus
Diawasi Secara Ketat



16 Pemerintah Diminta
Kaji Ulang Kenaikan
Iuran BPJS Kesehatan

DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna tersebut meminta persetujuan seluruh Fraksi atas RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, usai Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan laporannya di hadapan Rapat Paripurna.

“Seperti yang disampaikan Pak Sugeng, dalam pandangan mini Fraksi, 8 Fraksi setuju, 1 Fraksi menolak. Apakah itu dapat disetujui, pandangan mini Fraksi sebagai persetujuan? Setuju?” tanya Puan kepada Anggota DPR RI yang hadir secara fisik di di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5), maupun yang hadir secara virtual. Jawaban “setuju” pun dilontarkan, sembari diiringi ketokan palu sidang oleh Puan Maharani.

Dengan diketoknya palu sidang oleh Ketua DPR RI tersebut tanda disahkannya RUU Minerba sebagai UU. Sejatinnya Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan tingkat II tentang RUU Minerba tersebut melanjutkan hasil pembahasan di tingkat pertama yang sudah diselesaikan di Komisi VII DPR RI pada hari sebelumnya. Dengan disepakatinya RUU ini, tinggal menunggu proses administrasi di Pemerintah untuk diterbitkan UU Minerba yang baru.

Sebelumnya, dalam laporannya di hadapan peserta Rapat Paripurna tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan dalam RUU Minerba terdapat 83 pasal diubah, 52 pasal baru, dan 18



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima laporan pembahasan dan pandangan akhir Pemerintah terkait RUU Minerba dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto: Eno/MAN

pasal dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209. Ia mengatakan, proses pembahasan RUU Minerba ini proses penyusunannya sudah dimulai sejak tahun 2015, kemudian menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, dan telah menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan Raker dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I. Pembahasan RUU Minerba dan pembahasan sejumlah 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan penetapan anggota Panja. “Proses pembahasan DIM RUU Minerba dilaksanakan secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020,” papar politisi Partai NasDem ini dalam laporannya di Rapat Paripurna.

Sementara itu Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat menyampaikan pandangan akhir terkait RUU Minerba mewakili Presiden RI menyatakan RUU Minerba memuat poin-poin penting, diantaranya penguatan BUMN. Wilayah pertambangan bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat ditetapkan WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN.

Pemerintah juga menjamin perpanjangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Selain itu, RUU Minerba memuat aturan yang tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian di dalam negeri. Ia juga menyebut dalam RUU Minerba, DPR RI dan Pemerintah sepakat mengenai divestasi saham. ■ ayu/es/sf



Azis Syamsuddin Gelar Dialog Bahas Penanganan Covid-19

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan perkembangan pandemi virus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Untuk itu, DPR RI sudah bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 dengan menyalurkan bantuan-bantuan yang berguna dalam menangani permasalahan pandemi tersebut. Diketahui, DPR RI juga sudah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI.

Hal itu diungkapkan Azis saat menggelar dialog virtual dengan Junior Doctor Network (JDN) Indonesia terkait perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta (17/5). Turut hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (F-Golkar). Dialog ini dipandu langsung oleh dr. Vito Damay dan dr. Reisa Broto Asmoro.

“Dengan cepat kita langsung membuat Satgas lawan Covid-19. Di situ kita menyalurkan alat-alat pelindung diri (APD) seperti masker dan (alat) penunjang lainnya. Kemudian

kita membentuk dapur umum di Jabodetabek dengan membagikan makanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” papar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Azis menegaskan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI dibentuk dengan menggunakan dana yang dikumpulkan bersama-sama dengan Anggota Parlemen lainnya, sehingga tidak membebani keuangan negara. “Saya sampaikan Satgas lawan Covid-19 ini kita bentuk murni dari dana-dana para Anggota DPR dan juga CSR (Corporate Social Responsibility) yang terkumpul kita tidak menggunakan dana dari negara,” ujar Azis.

Politisi Fraksi Partai Golkar dan wakil Lampung II itu menilai kesadaran masyarakat Indonesia terutama pada daerah-daerah tertentu terhadap penularan virus Covid-19 sangat rendah, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kompak antara Satgas Lawan Covid-19 DPR RI dengan para dokter terutama yang tergabung di JDN untuk mensosialisasikan dan mempercepat penanganan pandemi tersebut. ■ tn/sf



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Eno/MAN



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL Ketua PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallo, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Suasana Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Arief/MAN

RUU Haluan Ideologi Pancasila Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menjadi usul inisiatif DPR RI. Persetujuan ini diperoleh setelah sembilan Fraksi menyerahkan pendapat tertulisnya kepada Pimpinan Dewan. Sebelum diparipurnakan, RUU ini terlebih dulu disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan perwakilan Fraksi di Baleg juga telah menyampaikan pandangan dan masukan atas draf RUU tersebut.

“Kini saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah pendapat Fraksi-Fraksi atas usul inisiatif Badan Legislasi terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” tanya Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani kepada Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna yang digelar secara kehadiran

fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta maupun secara virtual dari kediaman masing-masing, Selasa (12/5).

Serentak, para Anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun secara virtual menyatakan persetujuan atas RUU tersebut. Saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, atas dasar itulah RUU ini disusun.

Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

arah bagi seluruh warganegara dan penduduk Indonesia.

Selain itu, RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Demi mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur.

Adapun perwakilan tiap-tiap Fraksi yang menyampaikan pandangan tertulisnya kepada Pimpinan DPR, yakni Sturman Panjaitan (Fraksi PDI-Perjuangan), Ferdiansyah (Fraksi Golkar), Hendrik Lewerissa (Fraksi Gerindra), Fauzi H Amro (Fraksi NasDem), Neng Eem Marhamah Zulfa (Fraksi PKB), Herman Khaeron (Fraksi Demokrat), Bukhori (Fraksi PKS), Guspari Gaus (Fraksi PAN), dan Syamsurizal (Fraksi PPP). ■ eko/sf

Masa Persidangan III DPR Difokuskan pada Penanganan Covid-19

Ketua DPR Dr. (H.C.) Puan Maharani menuturkan, kinerja DPR RI di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang telah usai dilakukan dengan fokus pada penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Puan memastikan, DPR RI turut serta bergotong royong membantu Pemerintah dalam mengatasi persoalan virus yang mematikan ini.

“Pada Masa Persidangan III ini, kita bekerja bersama, bergotong royong, fokus pada upaya untuk menanggulangi Covid-19 dan dampaknya. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berdampak luas pada seluruh sendi kehidupan rakyat dan juga telah berdampak dalam penyelenggaraan negara,” ujar Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan III pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

Diakui pula, pandemi Covid-19 telah menghadirkan ancaman yang serius terhadap kesehatan rakyat, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat. Sehingga perlu kehadiran negara sebagai penyelamat dari ancaman ini. “Penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, pada dasarnya adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum,” tegas Puan lebih lanjut.

Oleh karena itu, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, negara dan Pemerintah harus hadir dalam menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman



Ketua DPR Dr. (H.C.) Puan Maharani membacakan pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Foto: Kresno/MAN



DPR RI JUGA IKUT BERGOTONG ROYONG, DALAM MENDUKUNG DAN MEMPERCEPAT UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

krisis kesejahteraan, dengan melakukan upaya, kebijakan, dan program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya. “Kehadirannya yang meliputi penguatan kapabilitas di bidang kesehatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi, serta menjaga derajat kesejahteraan rakyat tetap dalam kondisi yang baik,” jelasnya.

Puan juga menegaskan bahwa DPR RI pun turut memberikan dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dan dampaknya, dan DPR RI akan terus melakukan *monitoring*, evaluasi, pendalaman, dan penajaman atas pelaksanaan dari program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, melalui tiga fungsinya, yakni Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran dan Fungsi Legislasi Dewan.

“DPR RI juga ikut bergotong royong, dalam mendukung dan mempercepat upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 yang merupakan kerja bersama lintas partai. Satgas ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, rumah sakit atau puskesmas di daerah,” pungkask legislator dapil Jawa Tengah V itu. ■ hs/sf

Pemerintah Diminta Perkuat *Grand Design* Pengembangan Sektor Perikanan



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel Foto: Jaka/MAN

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Pemerintah lebih memperkuat rancangan besar (*grand design*) pengembangan sektor perikanan dan hasil laut agar potensinya bisa digarap optimal untuk meningkatkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Langkah ini menjadi penting karena sektor perikanan mempunyai potensi kontribusi yang besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca wabah virus Corona (Covid-19).

“Potensi sektor perikanan kita sangat besar, bisa mencapai lebih 60 juta ton per tahun, baik dari penangkapan maupun budi daya. Namun selama ini belum tergarap optimal, sehingga industri perikanan terpaksa impor untuk memenuhi bahan bakunya. Perlu perbaiki *grand design* kebijakan pengembangan sektor perikanan agar berkontribusi signifikan dalam mempercepat pemulihan ekonomi

pascapandemi Corona ini,” kata Gobel dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Minggu, (17/05).

Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia mempunyai potensi perikanan sampai 67 ton per tahun, baik yang berasal dari ikan tangkap maupun ikan budi daya. Potensi produksi lestari dari hasil tangkapan maksimum (Maximum Sustainable Yield/MSY) mencapai 10 juta ton per tahun, di mana potensi tangkap laut sekitar 9 juta ton dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 1 juta ton per tahun. Sisanya, sekitar 57 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budi daya, baik laut (mariniculture), perairan payau (tambak), maupun perairan tawar (darat).

“Dengan potensi tersebut, sektor perikanan harus bisa menjadi salah satu tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik melalui proses peningkatan nilai tambah

hasil produksi nelayan maupun lewat penyerapan lapangan kerja,” katanya. Namun, lanjut Gobel, dari pengamatan dan data, sektor ini masih banyak masalah sehingga potensi ekonominya tidak bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, salah satunya adalah ketidakmampuan melakukan kegiatan perikanan yang lestari.

“Kondisi dan peraturan saat ini belum mendorong sepenuhnya pelaku di sektor ini untuk taat asas dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan zonasi tata ruang. Dampaknya, terjadi pencemaran lingkungan di kawasan lindung dan melanggar batasan zona penangkapan ikan,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.

Hal itu terjadi antara lain karena zonasi pelaku perikanan dan nelayan masih terkonsentrasi, khususnya di Jawa. Oleh karena itu, harus ada kebijakan migrasi bagi pelaku sektor perikanan dari zona jenuh ke wilayah yang lebih luas dan besar potensi tangkapnya. “Tidak mudah, namun harus dilakukan dengan kebijakan yang taktis dan strategis. Artinya, migrasi dilakukan dengan mengeliminir potensi konflik etnis dan kelompok,” ujar Gobel.

Sebagai gambaran, politisi Fraksi Partai NasDem ini mengusulkan, misalnya memindahkan nelayan dan pelaku industri perikanan di Jawa ke daerah tangkap yang luas dengan potensi ikan yang besar di wilayah Sulawesi, seperti mendorong mereka ke kawasan perairan Majene, Tual, dan Gorontalo, atau ke wilayah Sulawesi lainnya. ■ hs/sf

Pemerintah Perlu Bantu Usaha Pers di Masa Pandemi

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai Pemerintah harus memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi agar mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu Pemerintah melakukan diseminasi informasi Covid-19 kepada masyarakat. Pers sebagai pilar keempat dalam berdemokrasi berperan penting dalam pandemi Covid-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoaks. Tanpa bantuan pers, berbagai informasi Pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat luas.

“Maka dari itu Pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita. Sebagian usaha pers ini sebelum pandemi datang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik. Saat pandemi datang, kondisi semakin berat,” kata Sukamta dalam keterangan persnya, Minggu (17/5). Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menuturkan, sebagaimana skema Pemerintah untuk membentuk UMKM dan dunia usaha, juga perlu dilakukan langkah yang sama kepada usaha pers.

Menurutnya, Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerja sama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait COVID-19. “Tentunya segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat,” jelas Sukamta. Kendati demikian, Sukamta mengingatkan bahwa bantuan Pemerintah terhadap

usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul, hilang daya kritis terhadap Pemerintah.

Dalam kondisi krisis akibat pandemi seperti ini menurut legislator dapi Di Yogyakarta itu, peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi aturan yang dapat memicu *moral hazard* penyelenggara negara, maka di sini pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang. Mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan Pemerintah dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

“Kita tahu selama masa pandemi Covid-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik

untuk melakukan *physical* dan *social distancing*. Namun demikian terkadang pers hanya menyambungkan suara dari Pemerintah tanpa memberikan pembeding yang kuat. Khususnya konten media *straight news* yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik,” tandas Anggota Banggar DPR RI ini. ■ ann/sf



Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Eot/MAN

Pemberian Asimilasi Narapidana Harus Diawasi Secara Ketat

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Saut Poltak Silitonga agar teliti dan mengawasi secara ketat pemberian asimilasi kepada warga binaan, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Menurutnya pengawasan asimilasi mutlak dibutuhkan agar mantan warga binaan tidak mengulangi tindak kejahatan yang serupa, rakyat pun bisa dibuat resah jika residivis berkeliaran di lingkungannya.

“Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat,” papar Herman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PAS di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Agar pengawasan berjalan dengan optimal, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta petugas di balai pemasyarakatan (bapas) terus berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dengan begitu, jajaran Forkopimda juga bisa memantau pergerakan para narapidana yang mendapat asimilasi.

“Petugas bapas juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, bapas harus meminta bantuan dan bekerja sama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran Forkopimda,” pesan Herman sembari mengingatkan.



Ketua komisi III DPR RI Herman Herry. Foto: Kresno/MAN

”

KRITERIA NARAPIDANA YANG AKAN DIKELUARKAN LEWAT KEBIJAKAN PERCEPATAN ASIMILASI HARUS DIAWASI DENGAN KETAT

la pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi di media sosial, soal dugaan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh para narapidana asimilasi tersebut. Meskipun demikian, Herman tak menutup mata bahwa potensi narapidana asimilasi tersebut kembali berbuat jahat tetap terbuka.

“Saya harap masyarakat tidak langsung termakan oleh berita provokatif yang disebar di media

sosial. Sudah ada bukti beberapa kejadian yang disebut dilakukan oleh narapidana asimilasi, namun ternyata tidak benar,” ungkap Anggota Dewan dari dapil Nusa Tenggara Timur II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PAS Reynhard Saut Poltak Silitonga mengungkapkan sebanyak 39 ribu lebih warga binaan mendapatkan asimilasi dari Kemenkum HAM. Dari puluhan ribu warga binaan yang diberi asimilasi, terdapat 95 pelanggaran asimilasi, di mana sebagian besar melakukan pelanggaran syarat umum.

“Hasil evaluasi per tanggal 10 Mei 2020, asimilasi dan integrasi terjadi pelanggaran sebanyak 95 kasus dengan rincian sebagai berikut, pelanggaran terhadap syarat umum sebanyak 93 kasus ini adalah yang artinya melakukan tindak pidana dan sekarang yang berada di kepolisian dan juga sebagian sudah dimasukkan ke lapas kembali di dalam strap sel. Pelanggaran terhadap syarat khusus sebanyak 2 kasus,” ungkap Reynhard. ■ eko/sf

Anjoknya Harga Gabah Membuat Petani Resah

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengaku kecewa sebab panen raya yang terjadi di tahun ini tidak membuat petani gembira, bahkan resah, dikarenakan harga gabah yang anjlok. Ia khawatir hal ini bisa membuat guncangan ekonomi di kalangan petani.

“Petani murung, meski panen raya, karena harga gabah yang jatuh. Petani kita berada dalam situasi sulit. Kalau (situasi) ini terus berlanjut, maka akan terjadi keguncangan ekonomi,” analisa Muslim dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (14/5).

Berdasarkan data yang diperoleh Muslim, diketahui bahwa 32 persen dari total panen gabah saat ini dijual di bawah Rp 4200 atau di bawah harga Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Angka 32 persen ini adalah peringatan manakala nanti sampai di atas 50 persen maka statusnya menjadi ‘awas’.

”

**JANGAN BIARKAN
PETANI LARUT
DALAM KESEDIHAN
AKIBAT RENDAHNYA
PENGHASILAN YANG
DITERIMA SERTA
TIDAK SEBANDING
DENGAN MODAL DAN
USAHA YANG TELAH
DIKELUARKAN**

Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, kondisi sulit ini harus segera dicarikan solusi. Jangan biarkan petani larut dalam kesedihan akibat rendahnya penghasilan yang diterima serta tidak sebanding dengan modal dan usaha yang telah dikeluarkan para petani.

“Apabila terus dibiarkan bisa membuat para petani berpikir ulang untuk terus melanjutkan usaha pertaniannya. Data menunjukkan bahwa jumlah petani dan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun terus berkurang, yang ditengarai akibat faktor ketidaksejahteraan ini,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh II itu. ■ hs/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Muslim.
Foto: Rumi/MAI

Komisi V Beri Atensi Khusus Kebijakan Pengendalian Transportasi Kemenhub



Ketua Komisi IV DPR RI Lasarus. Foto: Jaka/MAN

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan atensi khusus terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai aturan berlakunya kembali moda transportasi darat, laut dan udara secara nasional. Lasarus menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah tersebut. Maka, seiring dengan itu, Komisi V DPR RI mengingatkan Kemenhub untuk benar-benar fokus dalam protokol penanganan virus Corona (Covid-19) dengan sebaik-baiknya.

Sebab, sambung Lasarus, jangan sampai ke depannya justru penyebaran Covid-19 semakin menjadi akibat dari longgarnya protokol penanganan Covid-19

terhadap berlakunya kebijakan aturan berlakunya kembali moda transportasi itu. Hal tersebut disampaikan Lasarus saat memimpin Raker dengan Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar secara kehadiran fisik dan virtual, Senin (11/5).

"Kami mengamati secara seksama dan kami atensi terhadap kebijakan terkait berlakunya kembali moda transportasi darat laut udara. Kami berharap betul bahwa protokol pencegahan Covid-19 ini dapat diterapkan secara baik. Jangan sampai, ini sulit untuk diterapkan dan malahan justru sebaran Covid-19 ini terjadi dari longgarnya

protokol penanganan Covid-19 terhadap berlakunya kembali moda transportasi ini," ujar Lasarus.

Di sisi lain, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan, harus diakui ada terjadinya kegalauan di tengah masyarakat tentang kebijakan pemberlakuan kembali moda transportasi. Terutama, ia selaku Ketua Komisi V DPR RI banyak mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak terutama berbagai kepala daerah yang mempertanyakan kebijakan yang cukup membingungkan itu.

Maka, legislator dapil Kalimantan Barat II tersebut menegaskan kembali bahwa kebijakan pemberlakuan kembali moda transportasi tersebut menjadi atensi khusus Komisi V DPR RI. Untuk itu, tutur Lasarus, ke depannya dalam masa reses nantinya tiap-tiap Anggota Komisi V akan melakukan pengawasan secara baik kami untuk mengawasi kebijakan pemberlakuan kembali moda transportasi tersebut di daerah pemilihan masing-masing.

"Dalam masa reses nantinya masing-masing kami akan mengawasi wilayah kita masing-masing. Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa kebijakan ini tidak akan ada celah bagi penyebaran Covid-19 dibandingkan masa ketika moda transportasi ini kita hentikan. Sehingga, yang ditakutkan oleh masyarakat dan banyak pihak bahwa berlakunya kembali moda transportasi terutama di wilayah yang masih berstatus PSBB tidak akan menyebarkan virus Covid-19," pungkas Lasarus. ■ pun/sf

Novita Wijayanti Soroti Penumpukan Penumpang Bandara Soetta

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti penumpukan penumpang yang terjadi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19. Menurut Novita, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan pihak otoritas bandara maupun maskapai seharusnya melaksanakan protokol kesehatan dengan super ketat.

“Termasuk, pihak otoritas bandara maupun maskapai harus memanfaatkan teknologi dalam pemenuhan persyaratan penumpang. Kalau terjadi penumpukan penumpang seperti itu sangat rawan memicu terjadinya penyebaran virus Covid-19. Karena, tidak diterapkannya *physical distancing* atau jaga jarak dalam situasi seperti itu,” ujar Novita dalam siaran persnya kepada **Parlementaria**, Jumat (15/5).

”

PEMERINTAH AGAR SERIUS MEMERANGI PANDEMI WABAH DALAM NEGERI DENGAN MENERAPKAN PSBB SECARA MAKSIMAL. PERKETAT PSBB INI SAMPAI KITA MELEWATI PUNCAK VIRUS COVID-19



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto: Runi/MAN

Novita mengungkapkan, pemanfaatan teknologi untuk pemenuhan syarat administrasi bisa dikirim via *online* atau daring oleh penumpang sebelum sampai bandara. Dengan demikian, dapat menghindari adanya penumpukan penumpang dalam penyampaian syarat ke petugas di bandara. Ditambah, dengan ditempatkannya peralatan teknologi kamera pengawas (CCTV) yang dapat mendeteksi suhu badan seluruh calon penumpang pesawat.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti terkait administrasi para calon penumpang yang akan bepergian. Seperti, sambung legislator dapil Jawa Tengah VIII ini, perlunya surat keterangan sehat bebas Covid-19 oleh para calon penumpang

yang memenuhi kriteria. Novita menegaskan, surat keterangan sehat wajib melalui cek kesehatan yang benar dan standar surat kesehatan yang jelas dari instansi terkait.

“Jadi, saya mendesak Pemerintah segera mengevaluasi dalam implementasi PSBB di lapangan. Saya meminta, Pemerintah agar serius memerangi pandemi wabah dalam negeri dengan menerapkan PSBB secara maksimal. Perketat PSBB ini sampai kita melewati puncak virus Covid-19. Mengingat, hingga saat ini belum mencapai puncak pandemi dan berdasarkan data resmi Pemerintah masih terus menunjukkan bertambahnya jumlah positif,” pungkas Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini. ■ pun/sf

PSBB Efektif Tekan Penyebaran Virus Covid-19

Setelah diberlakukan sekitar tiga bulan terakhir, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di setidaknya 4 provinsi dan lebih dari 20 kabupaten/kota, relatif berhasil menekan penyebaran virus Corona (Covid-19). Di sejumlah daerah, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai Covid-19 ini mengalami penurunan berarti. Setidaknya, angka pergerakan pasien positif Covid-19 kian melambat.

“Pasti ada hasil terbaik dengan menekan penyebaran virus. Di beberapa daerah menunjukkan penurunan. Ke depan, kebijakan ini harus dijadikan protap dan kebiasaan. Karena virus selalu ada, tak pernah ada habisnya,” analisa

”

PASTI ADA HASIL TERBAIK DENGAN MEKAN PENYEBARAN VIRUS. DI BEBERAPA DAERAH MENUNJUKKAN PENURUNAN. KE DEPAN KEBIJAKAN INI HARUS DIJADIKAN PROTAP DAN KEBIASAAN. KARENA, VIRUS SELALU ADA TAK PERNAH ADA HABISNYA

Nasim kepada *Parlementaria* saat dimintai komentarnya via Whatsapp, Senin (18/5).

Dikatakan Nasim, virus selalu muncul mewabah di tengah kehidupan masyarakat. Virus baru mungkin muncul lagi dan vaksin baru pun diproduksi untuk melawan penyebaran virus tersebut. Virus kerap datang dan pergi. “Yang namanya virus tidak akan hilang selamanya atau habis,” ucap politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Legislator dapil Jawa Timur III tersebut mendukung penelitian yang terus dilakukan untuk menemukan berbagai vaksin yang mampu melawan virus. Bahkan, penelitian ini bisa bekerja sama dengan dunia internasional. Bila kelak sudah ditemukan vaksin yang tepat untuk mencegah virus Covid-19, maka harus segera diproduksi massal untuk melindungi masyarakat. ■ mh/sf

Anggota Komisi VI DPR RI
Nasim Khan. Foto: Andri/MAN



Sondang Tampubolon Apresiasi Pelayanan Perusahaan Transportasi Daring

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon memberikan apresiasi kepada penyedia jasa transportasi daring (online) yang terus berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit saat ini. Menurutnya para perusahaan ini telah berhasil menyelamatkan pergerakan arus barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama dari PT. Gojek dan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) secara virtual, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya transportasi *online* dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini telah memudahkan masyarakat Indonesia yang selama ini mengikuti imbauan Pemerintah dengan bertahan di rumah masing-masing.

“Oleh karena itu kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh jajaran transportasi *online* dan juga kepada para mitra-mitra transportasi *online*, baik itu *driver* dan mitra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang masih saat ini dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada memberikan pelayanan atau servisnya kepada masyarakat seluruh Indonesia,” ucap politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sondang juga mengungkapkan bahwa perkembangan industri ini telah menjadi *lifestyle* di Indonesia, sebab tidak sedikit dari para pekerja formal sekalipun yang tergiur dalam bisnis ini dan kemudian beralih menjadi mitra perusahaan transportasi daring. Hal ini tentu menurutnya sangat berpengaruh

besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Kita bisa melihat bahwa banyak pekerja-pekerja formal di Indonesia yang profesinya mungkin sudah cukup baik bekerja di sektor formal, beberapa waktu belakangan ini berubah atau mengambil alih profesi lain yaitu menjadi mitra para transportasi *online* ini baik menjadi *driver* di Gojek, Gocar, dan lain sebagainya,” imbuh Sondang.

Kemudian legislator dapil DKI Jakarta I itu menambahkan bahwa sudah waktunya Pemerintah melakukan transformasi dalam bentuk regulasi yang dapat meningkatkan tata kelola industri transportasi di dalam negeri. Sebab menurutnya kondisi regulasi saat ini masih belum berjalan baik, sehingga memungkinkan adanya tumbuh perusahaan-perusahaan baru yang

tidak diharapkan.

“Karena saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang menjanjikan dan futuristik. Kita harus memberikan masukkan *insight-insight* kepada Pemerintah bahwa ini harus ada terjadi transformasi kepada digitalisasi. Supaya ini bisa menjadi salah satu *indicator performance* daripada industri transportasi kita,” jelas Sondang.

Bukan tanpa alasan, Sondang justru berharap perusahaan yang akan berpartisipasi nanti dapat membantu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di masyarakat Indonesia. “Kita berharap tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang naik, tetapi pendapatan atau *income* per kapita masyarakat Indonesia dengan adanya *unicorn* ini pun bisa terasa, karena ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. ■ *er/sf*



Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto: Azka/MAN

Bansos Juga Perlu Diberikan untuk Kaum Disabilitas

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasani Bin Zuber meminta Pemerintah untuk memperhatikan nasib kaum disabilitas yang juga terdampak perekonomiannya akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Ia pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo yang telah menyiapkan enam program bantuan seperti bantuan sosial (bansos) khusus bahan kebutuhan pokok juga dialokasikan untuk para penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menyoroti realisasi berbagai program bantuan tersebut karena tidak merata. Menurutnya, penyandang disabilitas menjadi salah kelompok masyarakat yang menurut Hasani belum tersentuh bantuan dari program Pemerintah. "Kami mendapat keluhan itu (tidak merata) yang salah satunya dari Forum Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia," ujar Hasani dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Minggu (17/5).

”

PENYANDANG DISABILITAS MENJADI SALAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENURUT HASANI BELUM TERSENTUH BANTUAN DARI PROGRAM PEMERINTAH

Hasani mengusulkan Pemerintah membuat bantuan khusus disabilitas, yaitu bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) disabilitas. Ia yakin, program khusus akan membuat bantuan lebih tepat sasaran. "Kita berharap Pemerintah hadir, jumlah disabilitas hanya 8 persen dari total penduduk Indonesia. Tentu kami menyayangkan kalau masih banyak yang tidak mendapat bantuan," ujar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Hasani juga menilai telah terjadi ketimpangan akurasi data terhadap penerima bansos, sehingga pembagiannya tidak merata. Karenanya, ia pun mendesak agar dalam beberapa waktu ke depan penyandang disabilitas mendapat prioritas dalam menerima bansos ini. "Target pemerintah, bansos dan BLT ini ditarget mencakup 19 juta orang di luar Jabodetabek. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21 juta orang," pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu menutup pernyataannya. ■ hs/sf

Anggota Komisi VIII DPR RI
Hasani Bin Zuber. Foto: Andri/MAN



Wacana Pemerintah Longgarkan PSBB Dinilai Tidak Tepat

Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir menilai wacana kebijakan Pemerintah melonggarkan peraturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di tengah wabah virus Corona (Covid-19) yang kian merambah di sejumlah wilayah Indonesia, tidak tepat karena dapat membuat risiko rantai penularan virus semakin besar.

“Saat ini masih terlalu terburu-buru. Seperti, Kementerian Perhubungan yang mengizinkan kendaraan operasional kembali beroperasi dan adanya rencana diperbolehkannya warga usia 45 tahun ke bawah beraktifitas seperti biasa. Tentu



Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir. Foto: Andri/MAN

”

DI SATU SISI PEMDA ITU SEDANG GENCAR-GENCARNYA MELAKUKAN PSBB, TETAPI PEMERINTAH PUSAT MALAH MENGIZINKAN MODA TRANSPORTASI BEROPERASI KEMBALI, SEHINGGA TIDAK KOMPAK YANG MEMBUAT MASYARAKAT BINGUNG

ini akan membahayakan,” tegas Asli saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, Selasa (12/5).

Politisi F-PAN itu mengatakan saat ini kasus positif virus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Sehingga, Pemerintah harus mengutamakan kebijakan-kebijakan yang dapat terus menekan angka kasus baru. “Seharusnya dipikirkan solusinya dulu, agar kasus ini tidak bertambah. Jangan sampai, Indonesia seperti di negara-negara lain yang angka kematiannya sangat

besar,” pungkas Asli.

Asli menyampaikan, dalam menangani virus Covid-19 ditemukan adanya ketidakkompakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga membuat masyarakat kebingungan. “Di satu sisi Pemda itu sedang gencar-gencarnya melakukan PSBB, tetapi Pemerintah Pusat malah mengizinkan moda transportasi beroperasi kembali. Sehingga, tidak kompak yang membuat masyarakat bingung,” analisa legislator dapil Sumbar itu. ■ tn/sf

Pemerintah Diminta **Kaji Ulang** Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini dikaji lebih mendalam.

Terlebih, saat ini masyarakat sedang kesusahan akibat dari sebaran virus Corona (Covid-19).

“Walaupun asumsinya masyarakat kelas 1 dan 2 adalah masyarakat yang mampu, tapi dengan adanya pandemi ini, banyak masyarakat miskin baru. Dalam artian sebelumnya mampu, karena Covid-19, kehilangan pekerjaan dan sebagainya sehingga mereka jadi susah, dan layak jadi masyarakat BPJS kelas 3,” ungkapnya, baru-baru ini.

”

WALAU PUN ASUMSINYA MASYARAKAT KELAS 1 DAN 2 ADALAH MASYARAKAT YANG MAMPU, TAPI DENGAN ADANYA PANDEMI INI, BANYAK MASYARAKAT MISKIN BARU. DALAM ARTIAN SEBELUMNYA MAMPU, KARENA COVID-19, KEHILANGAN PEKERJAAN DAN SEBAGAINYA



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Arief/MAN

Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Ninik ini pun meminta Pemerintah tidak egois. Pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi psikologi masyarakat yang masih berjibaku dengan Covid-19 dan tertekan sangat lama di rumah bahkan tertunda untuk pulang kampung saat Idul Fitri. Pemerintah, menurutnya hanya menambah masalah masyarakat dengan kebijakan BPJS Kesehatan yang tidak konsisten.

“Ini membingungkan dan bikin resah masyarakat. Ayo Presiden jangan main-main hati rakyat,” tegas Ninik seraya menyebut keluarnya Perpres ini rakyat seperti diombang-ambingkan tanpa adanya kepastian.

Ninik meminta Presiden Joko Widodo mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan rakyat. Sehingga, rakyat percaya presiden dan seluruh jajarannya sanggup untuk melindungi rakyatnya yang saat ini sedang mengalami musibah pandemi Covid-19 ini. ■ rnm/es

Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Tak Taat Hukum

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengingatkan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan, harus perlu memperlihatkan ketaatannya kepada asas dan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah. Untuk itu, Presiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Saya meminta Presiden melaksanakan Putusan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat mencontoh pemimpinnya dalam melaksanakan hukum,” kata Lucy dalam siaran persnya kepada *Parlementaria*, Kamis (14/5). Terkait rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres mulai Juli 2020 dan Januari 2021 mendatang, ia menilai Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

secara tidak langsung merupakan perbuatan melawan hukum.

Sebab, Perpres tersebut kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II terhitung mulai 1 Juli 2020. Sementara, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III dinaikkan tahun depan. “Menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan Putusan MA yang telah membatalkan Perpres

75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” terang politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Seharusnya, tegas Lucy, Pemerintah bisa melaksanakan putusan MA dengan taat asas. Legislator dapil Jawa Timur I itu khawatir jika Pemerintah memberi contoh tidak taat asas pada hukum, nanti rakyat mengikutinya. Bila itu yang terjadi, ini dipastikan berbahaya buat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Kalau seperti ini kan sama saja artinya Pemerintah Jokowi bermain-main dengan Putusan MA. Dan, ini jelas bukan contoh yang baik diperlihatkan Presiden Jokowi kepada rakyat yang ia pimpin. Saya meminta Presiden Jokowi melaksanakan Putusan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat menyontoh pemimpinnya dalam melaksanakan hukum,” pesan Lucy sembari menutup pernyataannya. ■ hs/sf



Anggota Komisi IX DPR RI
Lucy Kurniasari. Foto: Jaka/MAN

Omnibus Law Bidang Pendidikan Dorong Perguruan Tinggi Berinovasi



Anggota komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Jaka/MAN

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, *Omnibus Law* bidang pendidikan tinggi bertujuan untuk mendorong lahirnya konsep penerapan riset dan inovasi di perguruan tinggi, untuk selanjutnya terhubung dengan dunia industri sebagai pengguna.

“Dengan demikian, penerapan riset dan inovasi di perguruan tinggi tidak hanya menjadi wadah untuk menghadirkan pekerja. Namun, untuk membuka lahirnya dunia kerja

melalui penerapan riset dan inovasi,” ungkap Ferdiansyah melalui rilis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (12/5)

Ferdi, sapaan akrabnya menjelaskan sejumlah regulasi Pendidikan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Setidaknya, ada 3 Undang-Undang (UU) bidang Pendidikan yang harus direvisi, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi dan UU Guru dan Dosen. “UU Sisdiknas misalnya, disahkan pada 2003 dan sudah hampir 2 dekade,” ungkapnya.

Sementara, situasi dan kebutuhan di lapangan sudah jauh berkembang seperti revolusi industri 4.0 hingga disrupsi teknologi yang mengubah perilaku masyarakat. “Sudah barang tentu, UU yang hendak direvisi tersebut harus memiliki semangat *Omnibus Law* seperti yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini,” jelasnya.

Selain itu, menurut Ferdi, perguruan tinggi juga memiliki sekelumit masalah terkait lapangan kerja. Mulai dari rendahnya keterlibatan industri, peraturan dan persyaratan yang ketat, kurikulum yang kaku, dan kesenjangan dalam kompetensi dosen.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terdapat dukungan riset dan inovasi. Menurutnya, salah satu alasan mengapa masih rendahnya peringkat indeks inovasi Indonesia dalam kancah global dikarenakan banyak riset yang tidak mendapatkan dukungan dan perhatian.

“Dunia industri sebagai wahana yang langsung merealisasikan riset dan inovasi tersebut menjadi karya nyata dan berujung pada terciptanya lapangan kerja. Selama ini, riset dan inovasi banyak berhenti menjadi kertas dan hanya menjadi sebuah tulisan,” terang Ferdi.

Meski demikian, RUU tersebut masih berupa rancangan yang belum final dan masih memerlukan proses yang panjang. Masukan dari akademisi diperlukan untuk perhatian dan perbaikan,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI itu. ■ rnm/es

Penerapan PSBB Harus Benar dan Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro mengkritisi kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang membolehkan pekerja berusia 45 tahun ke bawah kembali bekerja seperti sedia kala dan beraktifitas di luar rumah. Menurutnya, itu sama dengan membiarkan makin banyak pekerja terpapar virus Covid-19. Penyebaran pandemi virus Covid-19 yang belum terputus ini harus disikapi sesuai dengan disiplin protokol kesehatan, dia pun menekankan agar penerapan PSBB harus benar dan terukur.

“Jadi, sementara ini kita bekerja lebih aman bekerja dari rumah. Yang terpenting sekarang itu, negara harus hadir dalam menjamin kesehatan masyarakat agar tidak terpapar dari virus Corona. Di antaranya, dengan penerapan PSBB yang benar dan terukur,” papar Fauzi dalam keterangan persnya, Rabu (13/5).

Fauzi beranggapan, kebijakan tersebut bersifat dikotomis antara pekerja usia 45 ke bawah dan pekerja usia 45 ke atas. Padahal, sebelumnya Pemerintah menghimbau agar masyarakat bekerja dari rumah saja sementara waktu sembari menunggu virus Covid-19 ini berlalu dan situasi kembali normal. Fauzi menilai kebijakan tersebut tidak konsisten.

“Kebijakan yang berubah-ubah itu menunjukkan bahwa pemerintah dalam penanganan Corona tidak konsisten bahkan terkesan *menacle-menacle*. Menurut saya sebaiknya Pemerintah

konsisten dalam menerapkan aturan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Termasuk, kebijakan bekerja dari rumah,” tutur Fauzi.

Politisi dari Fraksi Partai NasDem inijuga menyampaikan ketidakkonsistenan kebijakan Pemerintah juga terjadi pada aturan mudik. Menurut Fauzi, seharusnya tidak usah ada kelonggaran pada larangan mudik agar tidak ada lagi penyebaran virus Corona ke berbagai daerah.

“Bukan kebijakan yang berubah-ubah. Contoh, sebelumnya masyarakat dilarang mudik, tapi kini Menteri Perhubungan melonggarkan

kebijakan transportasi termasuk penerbangan yang kembali dibolehkan. Ini kan sama dengan mempercepat penyebaran virus Corona menyebar ke seluruh Indonesia” kritiknya.

Menurut Fauzi, saat ini akar masalah yang dihadapi bangsa yakni krisis kesehatan akibat wabah virus Corona. Sehingga, fokus penyelesaian sebaiknya ke penyelamatan nyawa rakyat. “Yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari virus Corona. Insya Allah akan kembali bangkit dan bergerak, kalau masalah Corona bisa segera atasi,” ungkap legislator dapil Sumsel I itu. ■eko/es



Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro. Foto: Arief/MAN

Aneh Jika RUU HIP Tidak Merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Pasalnya, lanjut Habib, TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya Ideologi Pancasila yang pernah hendak diganti

oleh Komunisme. Bangsa Indonesia kemudian memperingatinya dengan Hari Kesaktian Pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan Pancasila.

“TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan Pancasila sebagai soko

”

TENTU KITA SEMUA TIDAK BOLEH MENUTUPI NUTUPI SEJARAH TERSEBUT. JAS MERAH KATA BUNG KARNO, JANGAN SEKALI KALI MELUPAKAN SEJARAH. HAL INI TENTUNYA HARUS BENAR-BENAR DIPERHATIKAN

guru ideologi bangsa. Dengan Undang-Undang tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat,” ujar Habib dalam siaran persnya, Senin (18/5).

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, tak berlebihan jika kemudian tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan, apa sebenarnya motif penyingkiran TAP MPR tentang Komunisme tersebut dari RUU HIP. Masyarakat kemudian akan melihat, seolah-olah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi Pancasila.

“Tentu kita semua tidak boleh menutup-nutupi sejarah tersebut. Jas Merah, kata Bung Karno, Jangan Sekali Kali Melupakan Sejarah. Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan. Apalagi, para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentuk TAP MPR. Sebuah produk konstitusi yang sangat penting,” tegas legislator Komisi III DPR RI ini. ■ ayu/es



Ketua MKD DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy. Foto: OJJ/MAN



IIFPG menggelar bakti sosial kepada yayasan panti asuhan dan pondok pesantren di Gedung Pustakaloka, Kompleks Parlemen. Foto: Ist/Man

IIFPG Berikan Bantuan Sembako ke Yayasan dan Marbot Masjid

Ketua Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) Lita Adies Kadir mengatakan, bakti sosial (baksos) merupakan agenda rutin IIFPG yang dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan akan tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Dan untuk Ramadan tahun ini baksos dilakukan dengan cara yang berbeda, mengingat, situasi dan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat sebaran virus Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan *social distancing* atau *physical distancing*.

“Biasanya di Ramadan sebelumnya, kami selalu memberikan santunan kepada adik-adik panti asuhan dan mengundang ke Masjid DPR RI untuk melakukan buka puasa bersama. Karena kondisi tersebut di atas, maka bentuk baksos kami lakukan dengan cara yang berbeda, diserahkan ke sepuluh yayasan dan 100 orang Marbot Masjid,” ungkap Lita Adies Kadir di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (14/5).

Lita menambahkan, bahwa IIFPG sadar betul saat ini pandemi Covid-19 memberikan dampak sosial ekonomi yang begitu besar tidak terkecuali terhadap pondok pesantren dan yayasan panti asuhan. Karena itu sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap sesama, IIFPG ingin berbagi kasih dengan pondok pesantren, yayasan dan panti asuhan yang terdampak.

Pemberian sembako seperti beras, minyak, mie instan dan sebagainya yang berlangsung di Gedung DPR RI tersebut dilakukan secara simbolis. Sedangkan, bantuan sembako langsung dikirim ke lokasi. Tidak lupa, Lita juga berterimakasih kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI beserta jajarannya, dan tentunya kepada pengurus IIFPG yang dalam waktu yang cukup singkat tetap solid merencanakan dan menggelar bhakti sosial tersebut.

Baksos yang dilaksanakan IIFPG ini diapresiasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Adies

Kadir. Ia mengatakan, IIFPG sangat aktif menjalankan program bhakti sosial di setiap tahun. Secara tidak langsung, kegiatan ini mendukung kinerja dari bapak dan ibu Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Pada akhirnya, ia berharap semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi yayasan dan marbot penerima bantuan paket sembako. Sekaligus pandemi ini segera berakhir.

“Di bulan suci Ramadan, walaupun di tengah pandemi Covid-19 namun tidak menyurutkan langkah ibu-ibu yang tergabung dalam IIFPG ini untuk tetap menjalankan bhakti sosial ini. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap seluruh anggota IIFPG yang sudah peduli terhadap sesama,” puji Adies kepada IIFPG.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat Fraksi Partai Golkar DPR RI Yahya Zaini, serta Wakil Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Lita Azis Syamsuddin, serta seluruh pengurus dan anggota IIFPG. ■ ayu/es

Perpustakaan DPR Gelar Webinar ‘Menghafal Al Qur'an dengan Menyenangkan’

Perpustakaan DPR RI tetap memberikan terobosan dan inovasi terbaik di tengah-tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Salah satunya dengan mengadakan webinar (seminar virtual) yang kali ini mengambil tema “Kupas Tuntas Menghafal Al Qur'an dengan Menyenangkan”. Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yakni Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati dan Pengasuh Pondok Pesantren Tahfids Al Quran Al-Utsmani, Jakarta, Effendi Anwar.

“Sebenarnya, kegiatan seminar ini pada awalnya dirancang akan dilangsungkan pada 10-11 Maret lalu. Namun karena pandemi Covid-19, maka baru terlaksana hari ini secara virtual. Tujuannya, untuk membangun komunitas-komunitas DPR RI. Pasalnya, Perpustakaan DPR RI belakangan

membuka diri atau yang kami sebut dengan program inklusi. Program ini tidak hanya ditujukan untuk internal DPR RI semata, melainkan juga bisa dimanfaatkan masyarakat umum,” jelas Kepala Bidang Perpustakaan DPR RI Elfira Dianti, Senin (18/5).

Dilanjutkannya, hal tersebut dilakukan Perpustakaan DPR RI dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia berharap layanan *online* yang digelar Perpustakaan DPR RI ini tidak hanya diikuti selama pandemi Covid-19 saja. Namun, juga bisa diikuti masyarakat usai pandemi mdatang. Tidak tertutup kemungkinan, masih kata Elfira, ke depan akan digelar berbagai pertemuan *online* untuk komunitas lainnya. Seperti, komunitas menulis, komunitas fotografi dan lain sebagainya.

Dalam seminar yang dimoderatori oleh Peneliti DPR RI Lukman Nul

Hakim ini, Anis Byarwati menjelaskan bahwa Bulan Ramadan mempunyai kekhususan tersendiri dengan diturunkannya Al Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Bahkan, di dalam surat Al Muzammil ayat 6 disebutkan bahwa sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Tak berlebihan, jika kemudian ada salah satu hadist yang mensunahkan untuk memperbanyak membaca Al Qur'an pada malam Bulan Ramadan. Karena, pada waktu malam terputus segala kesibukan, terkumpul pada malam itu berbagai harapan, hati dan lisan pada malam bisa berpadu untuk bertadabbur.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al Quran Al Utsmani, Effendi Anwar memberikan tips dan trik bagaimana menghafal Al Quran dengan mudah menyenangkan. Yakni, lewat buka dan baca, tutup dan baca, serta salah dan baca. Tidak lupa Effendi juga menjelaskan pahala membaca Al Qur'an sebagaimana hadist riwayat At-Tirmidzi yang artinya, ‘Barang siapa membaca satu huruf dari Kitab Allah SWT, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipat’. “Saya tidak mengatakan ‘Alif Lam Mim’ satu huruf, tetapi ‘Alif’ satu huruf, ‘Lam’ satu huruf dan ‘mim’ satu huruf,” jelas Effendi. ■ [ayu/es/sf](#)



Kepala Bidang Perpustakaan DPR RI, Elfira Dianti saat mengadakan webinar bertema “Kupas Tuntas Menghafal Al Quran dengan Menyenangkan” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Oji/Man

KORPRI DPR Santuni Dhuafa dan Yatim Piatu

KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menginisiasi pemberian santunan dalam bentuk sembako kepada kaum dhuafa dan yatim piatu baik yang berada di lingkungan Setjen DPR RI maupun di lingkungan sekitar Kompleks Parlemen. Selain diberikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu di wilayah Palmerah dan Mampang, Jakarta, santunan juga diberikan utamanya kepada putra-putri Pegawai Setjen DPR RI yang meninggal dunia pada masa kerjanya.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin pemberian bantuan dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa dalam acara 'Pengurus KORPRI Berbagi', di Ruang Rapat Setjen, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/5). Turut hadir dalam acara itu Deputi Persidangan Damayanti, Plt. Deputi Administrasi Nunu Nugraha, Ketua KORPRI Indra Pahlevi, Kepala PUU Inosentius Samsul serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.

"Setjen DPR biasanya dalam setahun memberikan santunan sebanyak dua kali pada saat momen Ramadan dan menjelang Natal dalam bentuk sembako atau santunan. Kebetulan, yang hari ini hadir adalah putra-putri dari pegawai Setjen DPR yang tahun ini meninggal dunia di masa kerjanya tahun ini dan yang kedua kaum dhuafa dan yatim piatu di sekitar Kompleks DPR. Jadi, sekaligus pemberian santunan dari KORPRI kepada keluarga diprioritaskan untuk yatim piatu," ujar Indra.

Tentu, sambung Indra, di tengah masa pandemi Covid-19 pemberian santunan tersebut diharapkan bisa turut meringankan beban dari saudara-saudari yang membutuhkan. Lebih



Sekjen DPR RI Indra Iskandar memberikan bantuan dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa dalam acara 'Pengurus KORPRI Berbagi', di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/MAN

lanjut, pada kesempatan yang sama Indra menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian para pegawai Setjen DPR RI selaku orangtua dari putra-putri penerima santunan tersebut. Indra mengharapkan, silaturahmi antar semua lini tetap selalu terjaga sebagai bagian dari keluarga besar Setjen DPR RI.

Sementara itu, Ketua KORPRI Indra Pahlevi menyatakan KORPRI DPR secara rutin beberapa tahun terakhir ini kita biasanya dalam momentum Ramadan dan Natal selalu memberikan santunan. Di tahun ini, sambungnya, KORPRI DPR RI kembali menyelenggarakan santunan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu bertepatan di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, KORPRI menyiapkan 500

bingkisan yang terdistribusikan kepada dhuafa dan yatim piatu di lingkup Setjen DPR RI serta yang ada di sekitar Kompleks Parlemen.

"Kami berharap melalui bantuan ini mereka bisa kembali bersemangat. Tak kalah penting, kami juga berpikir di lingkup Setjen DPR terdapat yatim dan piatu selaku putra-putri dari Pegawai Setjen DPR yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Maka, KORPRI DPR sebagai wadah bagi para ASN di DPR tentu punya kewajiban moral untuk kita memikirkan nasib mereka yang juga keluarga besar kami. Selain itu, kami juga memberikan santunan kepada dhuafa dan yatim piatu di sekitaran DPR yakni wilayah Palmerah dan Mampang," pungkas Indra Pahlevi yang juga Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI itu. ■ pun/sf



**PIMPINAN dan ANGGOTA DPR RI
Serta SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Mengucapkan**



Selamat Hari Raya
Idul Fitri

—► 1441 Hijriah ◄—